

## Partisipasi Publik Berbasis Nilai Budaya Masyarakat Adat Baduy: Upaya Pelestarian Lingkungan

Ardiyansah, Uchaimid Biridlo'I Robby

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Krisnadwipayana

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Krisnadwipayana

Corresponding author: ardiyansah@unkris.ac.id

Received: 21 Juli 2023 | Revised: 04 September 2023 | Accepted: 12 September 2023

**Abstract:** *The increasing number of visits to Baduy customary areas poses a threat to their customary environment. This paper aims to provide an overview of the form of public participation based on the cultural values of the Baduy indigenous people in efforts to preserve the environment in their area. As it is known that the cultural values of the Baduy indigenous people are ancestral values that make the Baduy indigenous people live in harmony with nature and the environment. The application of cultural values is a form of public participation by the Baduy indigenous people, so that they can assist the government in the decision-making process. This research is a descriptive research with a qualitative approach by conducting interviews with 40 informants who are indigenous peoples and Baduy customary institutions, informants have also met the requirements to become resource persons for this research. The values of the Baduy people are grouped into four, namely, the values of life, the values of traditions and beliefs, the values of maintaining the balance of nature, and the values of togetherness/mutual cooperation. The cultural value in maintaining the balance of nature that has been carried out by the Baduy indigenous people is about how they carry out their daily lives, work side by side with nature, and the architecture of buildings in their area which is still natural without using chemicals. These cultural values are still carried out by the Baduy indigenous people as a form of public participation that runs optimally. This is a recommendation for the government in formulating policies related to nature conservation.*

**Keywords:** *public participation; cultural values; indigenous baduy people; nature conservation*

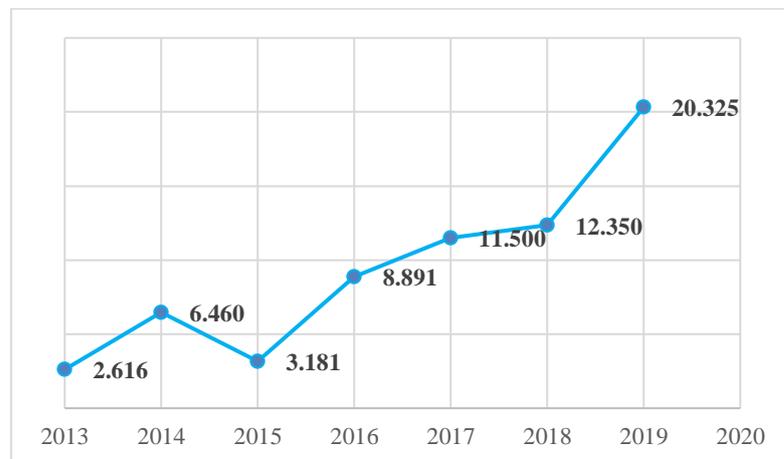
**Abstract.** Peningkatan jumlah kunjungan kawasan adat Baduy memberikan ancaman terhadap lingkungan adat mereka. Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana bentuk partisipasi publik berbasis nilai budaya masyarakat adat Baduy dalam upaya pelestarian lingkungan kawasan mereka. Seperti diketahui bahwa nilai budaya masyarakat adat Baduy merupakan nilai leluhur yang menjadikan masyarakat adat Baduy hidup selaras dengan alam dan lingkungan. Penerapan nilai budaya merupakan bentuk partisipasi publik yang dilakukan masyarakat adat Baduy, sehingga dapat membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada 40 informan yang merupakan masyarakat adat dan lembaga adat Baduy, informan juga telah memenuhi syarat untuk menjadi narasumber penelitian ini. Nilai masyarakat Baduy dikelompokkan menjadi empat yaitu, nilai kehidupan, nilai tradisi dan kepercayaan, nilai menjaga keseimbangan alam, dan nilai tentang kebersamaan/gotong royong. Nilai budaya dalam menjaga keseimbangan alam yang telah dijalankan masyarakat adat baduy yaitu tentang bagaimana mereka menjalankan kehidupan sehari-hari, bekerja dengan tetap berdampingan dengan alam, serta arsitektur bangunan dikawasan mereka yang masih alami tanpa menggunakan bahan kimia. Nilai budaya tersebut masih tetap dijalankan oleh masyarakat adat Baduy sebagai bentuk partisipasi publik yang berjalan optimal. Hal ini menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian alam.

**Kata kunci:** masyarakat adat Baduy; nilai budaya; partisipasi public; pelestarian alam

## PENDAHULUAN

Masyarakat adat didefinisikan sebagai kelompok etnis atau penduduk asli di suatu wilayah yang berbeda dengan kelompok yang telah menetap dan menduduki, wilayah. Masyarakat adat digambarkan sebagai penduduk asli ketika mereka mempertahankan tradisi atau aspek lain dari budaya awal yang mereka miliki. Masyarakat adat telah mampu menerapkan dan mengadaptasi pengetahuan dan lembaga adat mereka untuk mengatur dan mengelola lingkungan, seringkali bekerja sama dengan aktor lain (Berkes, 2009). Nilai-nilai lingkungan mengacu pada persepsi hubungan seseorang dengan alam yang tercermin dalam mengenali saling ketergantungan antara alam dan diri kita sendiri (Liu & Segev, 2017; Segev, 2015).

Salah satu masyarakat adat di Indonesia yang masih menjalankan nilai budayanya adalah Masyarakat Adat Baduy. Mereka merupakan salah satu suku yang bermukim di Kampung Cibeo, Kampung Cikeusik, dan Kampung Cikertawarna Kabupaten Lebak Provinsi Banten Indonesia. Suku Baduy masih memegang teguh pada nilai budaya leluhur seperti tidak menggunakan bahan kimia, tidak ada pembangunan fisik yang besar seperti jalan raya, listrik dan perumahan modern. Budaya baduy yang kuat memegang teguh nilai-nilai leluhur merupakan benteng utama dunia luar tidak memiliki intervensi terhadap komunitasnya serta sebagai upaya dalam melestarikan lingkungan mereka. Namun Beberapa tahun terakhir kunjungan ke kawasan adat Baduy terus meningkat (gambar 1). Hal ini berdampak bukan hanya pada akulturasi budaya tetapi juga ancaman pencemaran lingkungan yang ada di kawasan Baduy.



**Gambar 1.** Tren Kenaikan Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Wisata Adat Baduy

Dasar lingkungan yang baik diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan, bagaimana mencapai konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati secara bersamaan, dan pembangunan sosial-ekonomi di sisi lainnya (Adams & Hulme, 2001; Garnett, Sayer & du Toit, 2007; Hackel, 1999; McShane & Wells, 2004). Nilai-nilai sosial budaya mempengaruhi bagaimana orang menggunakan sumber daya alam, atau seberapa bersedia mereka untuk berperilaku berkelanjutan (Park et al., 2007; Ringov & Zollo, 2007), budaya mungkin memainkan peran penting dalam bagaimana masyarakat menghadapi berbagai masalah lingkungan (Ringov & Zollo, 2007).

Menurut sudut pandang lingkungan, masyarakat adat mendiami wilayah yang besar dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan berkontribusi pada peningkatan keanekaragaman hayati di wilayah yang berdekatan (Mistry & Berardi, 2016; Garnett et al.,

2018). Sampai hari ini, pelestarian lingkungan mendapatkan perhatian baru dalam konteks pembangunan berkelanjutan untuk memperluas kawasan konservasi termasuk banyak kawasan alami yang secara tradisional dimiliki, dikelola, digunakan, dan ditempati oleh masyarakat adat (Kopnina, 2018; IPBES, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana partisipasi publik berbasis nilai budaya masyarakat adat Baduy dalam upaya pelestarian lingkungan tanah adat. Hal ini dikarenakan lingkungan merupakan kegiatan publik yang khas, pemanfaatan lingkungan tidak kompetitif dan non-eksklusif, tanpa campur tangan pemerintah, perusahaan akan menyalahgunakan lingkungan (Li et al., 2016). Sementara itu, sebagian besar budaya telah mengembangkan prinsip-prinsip etika yang mengatur bagaimana manusia harus berhubungan secara tepat dengan lingkungan alam (Berghöfer et al., 2008; Bieling et al., 2020; Chan et al., 2016). Namun peran keterlibatan publik dalam perbaikan lingkungan dan pembuatan kebijakan lingkungan masih terbatas dan bersifat jangka pendek (Zhang et al., 2019).

## **KAJIAN PUSTAKA**

Studi tentang partisipasi publik dalam pelestarian lingkungan di luar negeri dimulai lebih awal dan relatif matang. Penelitian awal difokuskan pada mengusulkan teori partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan, menerapkan teori partisipasi publik untuk studi dan solusi untuk masalah lingkungan (Sample, 1993; Daniels, 1996; Adler, 2001). Karena model partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan didukung dan diakui banyak negara di seluruh dunia, banyak sarjana menggunakan pendekatan empiris dan studi kasus untuk membuat analisis yang lebih dalam dan konkrit tentang keadilan dalam proses partisipasi, dekomposisi proses partisipasi dan desain indikator evaluasi, dan lain-lain (Webler, 2000; Bond et al., 2004; Charnley & Engelbert, 2005; Doody et al., 2009; Carreira et al., 2016).

Pring & Noe, 2002 mendefinisikan partisipasi publik sebagai label menyeluruh yang digunakan untuk menggambarkan berbagai mekanisme yang mungkin digunakan individu atau kelompok untuk mengomunikasikan pandangan mereka tentang masalah publik. Mereka mengakui bahwa istilah tersebut dapat dipahami secara berbeda di wilayah geografis dan budaya yang berbeda. Partisipasi publik adalah proses yang berkelanjutan dan bukan peristiwa tunggal dan didasarkan pada prinsip bahwa orang-orang yang terkena dampak memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka, dan bahwa partisipasi mereka harus bermakna.

Partisipasi publik dianggap sebagai komponen penting dari tata kelola lingkungan (Daley, 2013; Zhang et al., 2019) dan umumnya dianggap sebagai keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan lingkungan (Hasan et al., 2018; Wang et al., 2020). Dalam tata kelola lingkungan, Masyarakat Adat diidentifikasi sebagai pemangku kepentingan atau kelompok kepentingan (Cullen et al., 2010). Para scholar telah mengidentifikasi banyaknya manfaat dari partisipasi publik dalam tata kelola lingkungan. Klyza & Sousa (2013) berpendapat bahwa hal itu dapat meningkatkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan pengambilan keputusan lingkungan. Ini juga dapat membantu meningkatkan kondisi kehidupan. Beberapa penulis, seperti Runhaar (2007) dan Thomas (1995) berpendapat bahwa tidak ada bentuk partisipasi yang secara inheren lebih baik daripada yang lain karena tingkat keterlibatan yang diperlukan tergantung pada karakteristik masalah kebijakan yang dihadapi. Partisipasi publik telah ditafsirkan oleh beberapa ahli sebagai

mekanisme untuk mengurangi kemungkinan konflik dengan memastikan keterwakilan kepentingan dan nilai yang berbeda, dan dengan mempromosikan transparansi. Beberapa peneliti, telah mencatat bahwa partisipasi publik sebenarnya dapat merefiksasi hubungan kekuasaan yang ada daripada menantang mereka (Devlin & Yap, 2008).

Sementara itu, Nilai-nilai budaya dianggap sebagai karakteristik mendasar dari suatu budaya serta menjadi keyakinan psikologis dan panduan bagi perilaku masyarakat (Mooij, 2015). Nilai-nilai budaya adalah penentu dasar bagaimana orang memandang diri mereka sendiri dan orang lain, dan bagaimana mereka memperlakukan satu sama lain. Sementara itu, sikap, dan keyakinan dalam kaitannya dengan kesuksesan, pekerjaan, kekayaan, persaingan, dan komponen lain dari lingkungan kita, ditentukan oleh nilai-nilai budaya (Park et al., 2015). Nilai-nilai budaya ditransmisikan melalui pengalaman, komunikasi, dan hubungan kehidupan sehari-hari yang lebih proksimal (Weisner et al., 2010).

Menurut Throsby, konsep nilai budaya dapat dipilah dalam beberapa unsur penyusunnya seperti nilai estetika, nilai spiritual, nilai sejarah dan yang penting untuk dianalisis dalam artikel ini adalah nilai budaya masyarakat adat. Sementara (Klamer, 2004) sebagian besar setuju dengan perbedaan Throsby antara nilai ekonomi dan budaya, ia memahami nilai sosial sebagai kategori terpisah yang menyangkut rasa memiliki, identitas dan perbedaan sosial. Kebingungan terjadi karena nilai budaya dalam arti antropologis mengacu pada nilai-nilai sosial, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan antara dan di antara orang-orang.

Hofstede (1989) kemudian memberikan pedoman yang paling efektif untuk mengukur budaya. Ukuran Hofstede, yang menentukan seluk-beluk dan nuansa hubungan lintas budaya, telah dimasukkan sebagai variabel kontekstual nilai budaya (Jones & Alony, 2007). Argumen dapat dibuat bahwa populasi negara dibatasi oleh latar belakang budaya yang beragam dan heterogenitas individu meskipun ada kecenderungan untuk menggeneralisasi fitur budaya tertentu dalam suatu bangsa dan kemudian menyamakan generalisasi dengan identitas budaya nasional atau terpadu (Farley & Lehmann, 1994). Prioritas nilai rata-rata anggota masyarakat merujuk pada penekanan budaya yang mendasari apa yang mereka hadapi (Schwartz, 2006). Inglehart (1997) menjelaskan nilai budaya menjadi ciri masyarakat dengan rata-rata prioritas nilai individu dalam sampel yang cocok dari setiap masyarakat. Pengukuran prioritas nilai berfokus pada nilai-nilai dasar, ini mencakup enam fitur utama:

1. Nilai adalah keyakinan yang terkait erat dengan pengaruh.
2. Nilai mengacu pada tujuan yang diinginkan yang memotivasi untuk melakukan sebuah tindakan.
3. Nilai melampaui tindakan dan situasi tertentu (misalnya, kepatuhan dan kejujuran adalah nilai yang relevan di tempat kerja atau di sekolah, dalam olahraga, bisnis, dan politik, dengan keluarga, teman, atau orang asing). Karakteristik ini membedakan nilai dari konsep yang lebih sempit seperti norma dan sikap yang biasanya mengacu pada tindakan, objek, atau situasi tertentu.
4. Nilai berfungsi sebagai standar atau kriteria yang memandu pemilihan atau evaluasi tindakan, kebijakan, orang, dan peristiwa.
5. Nilai diurutkan berdasarkan kepentingan satu sama lain untuk membentuk sistem prioritas. Ciri hierarki ini juga membedakan nilai dari norma dan sikap.

Arti penting relatif dari nilai memandu tindakan. Pertukaran antara nilai-nilai yang relevan dan bersaing itulah yang memandu sikap dan perilaku. (Schwartz, 2006). Panduan nilai tersebut yang



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Budaya

Masyarakat baduy adalah sekelompok masyarakat yang memegang teguh adat istiadat nenek moyang secara turun menurun. Seiring berkembangnya zaman dan gaya hidup modern, baduy tetap memilih hidup dalam kesederhanaan, ketulusan dan ketaatan pada perintah leluhur mereka untuk terus membantu antar sesama dan menjaga alam sekitar. Hal itu yang menjadi daya tarik masyarakat diluar baduy untuk datang dan melihat cara kehidupan masyarakat baduy. Masyarakat baduy memiliki keunikan dalam kehidupan yang dijalaninya. Secara umum masyarakat baduy telah menjalankan konsep pencagaran alam (*nature conservation*) dengan memperhatikan keselamatan hutan. Masyarakat baduy menyadari bahwa dengan menjaga hutan maka mereka akan menjaga keberlanjutan ladang. Selain itu, lahan hutan yang tidak berada dalam kawasan ulayat akan dibuka secara bergantian setiap tahunnya untuk dijadikan lahan pertanian mereka.

Peneliti menemukan bahwa ada beberapa budaya dan tradisi yang masih kuat dijalankan oleh masyarakat adat baduy. Budaya masyarakat adat baduy inilah yang menjadikan pelestarian alam di Baduy menjadi optimal. Beberapa budaya dan tradisi yang masih mereka jalani adalah tidak menggunakan bahan kimia, bertani menggunakan konsep lahan kering, tidak membuat jalan beraspal, dan menggunakan bahan alami untuk membangun rumah. Partisipasi masyarakat adat dalam menjaga nilai budaya mereka merupakan bentuk dari partisipasi publik yang berjalan optimal. Partisipasi publik dapat berfungsi sebagai alat bagi masyarakat untuk sepenuhnya mengembangkan kemampuan warga negaranya, memungkinkan warga negara untuk lebih memahami sistem pemerintahannya, sehingga mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kepentingan individu dan seluruh masyarakat (Barton, 2002; Hindess, 2002; Ciaran, 2010).

### Mata Pencaharian Masyarakat Adat Baduy

Mata pencaharian utama masyarakat Baduy adalah bertani ladang atau *huma* (padi tanah kering) (gambar 2). Sistem pertanian mereka mengikuti tradisi turun temurun yang hingga saat ini masih dilaksanakan. Bagi Masyarakat Baduy bertani dengan menggunakan sistem persawahan (tanah basah) dilarang menurut adat. Mereka juga dilarang mencangkul atau membajak tanah. Cara menanam padi mereka dengan melubangi tanah menggunakan *aseuk* (tongkat kayu yang diruncingkan bagian bawahnya). Mereka berladang secara berpindah-pindah, dengan masa *bera* (mengistirahatkan lahan) selama 3-5 tahun.



**Gambar 2.** Masyarakat Baduy menanam padi  
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Sejak 20 tahun belakangan ini, masyarakat Baduy melakukan cara dalam mengatasi keterbatasan masa produksi padi. Mereka telah melakukan penganekaragaman jenis tanaman, dengan memanfaatkan secara maksimal setiap tanah pekarangan dan ladang. Mereka menanam *nangka*, *durian*, *pisang*, *bambu* dan kayu sengon, sementara lahan untuk menanam padi ladang tetap dijaga untuk bahan makanan utama berupa beras. Selain itu mereka juga melakukan tumpang sari, memanfaatkan sela-sela tanah ladang *jalan huni* (jalanan setapan diantara tanaman padi) dengan menanam palawija *Jagung*, *Jabe*, *Cikur*, *Laja*, *Hiris*, *Kacang*, *Cabai*, *Terung* dan tanaman pangan lainnya.

### **Arsitektur Rumah dan Jembatan**

Bentuk rumah masyarakat Baduy hampir sama dengan rumah pada umumnya, namun bedanya adalah rumah masyarakat Baduy berbentuk panggung. Konstruksi rumah Baduy terbentuk atap rangka menggunakan bahan kayu dan bambu. Bagian atap membentuk bangun segitiga yang meruncing ke atas. Atap bangunan terbentuk oleh tiga *rarangki* atau rangka kuda-kuda atap dalam arah melintang bangunan (*sulah nyanda*) dan dua buah *panglari* atau konstruksi kuda-kuda dalam arah memanjang bangunan. Arah rumah masyarakat adat Baduy khususnya seluruhnya menghadap ke utara dan selatan. Rumah orang Baduy hanya berpintu satu tanpa memakai jendela (kecuali di Baduy luar, kini sudah menggunakan jendela). Bangunan rumah dilarang menggunakan tembok, serta dicat berwarna. Rumah Baduy dibangun dengan bergotong royong seluruh warga kampung, dengan tata ruang letak pemukiman Baduy selalu berada dekat dengan sumber air (sungai).

Material untuk membuat bangunan pada masyarakat Baduy Dalam khususnya, keseluruhannya diambil dari hutan di sekitar wilayah permukiman dari *huma*, *reuma* dan *leuweung kolot*. Pengambilan kayu dari *leuweung kolot* harus seijin *Puun*. Material bangunan seperti kayu diambil dari pohon di hutan yang dikelola menurut adat Baduy. Terdapat waktu-waktu khusus untuk melakukan pengambilan kayu. Kayu hanya boleh diambil pada pagi hari dengan melihat kondisi daun. Hal ini bertujuan sebagai teknik untuk pengawetan kayu. Selain itu terdapat pula aturan umur pohon. Ia harus berumur sekitar di atas 10 tahun. Hal ini adalah aturan adat yang ternyata memiliki korelasi akan kesadaran konservasi lingkungan hutan, yang telah disadari sejak

jaman dahulu. Teknik pengambilan bahan bangunan dan pengawetan material tersebut sangat ramah lingkungan.

Akibatnya konstruksi kayu dapat bertahan hingga 35 tahun dan keawetan konstruksi bambu sekitar lebih dari 15 tahun, tanpa pengawet bahan kimia. Bahan bambu juga tanpa menggunakan pengawet bahan kimia, tetapi melalui pengaturan waktu dalam penembangannya, yaitu hanya mengambil yang sudah berumur 3 tahun. Teknik pengawetan bahan-bahan tersebut, dengan cara merendamnya pada lumpur basah dalam waktu antara 3 bulan hingga 2 tahun. Hal ini sangat menarik, dimana teknologi konvensional dan material dipadukan dalam membuat bangunan yang ramah lingkungan dengan menggunakan material yang sederhana dan tersedia di dalam wilayahnya. Penggunaan bahan material konstruksi dari kayu dan bambu sangat sejalan dengan kecenderungan dunia saat ini. Penggunaan bahan ramah lingkungan sangat disarankan. Kayu dan bambu merupakan bahan bangunan yang terbarukan. Selain itu Bambu juga merupakan tumbuhan yang tergolong cepat dalam pertumbuhannya.



**Gambar 3.** Masyarakat Baduy menanam padi  
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Selain Rumah dan bangunan lain yang menjadi keunikan masyarakat adat Baduy, jembatan atau *Rawayan* di Baduy juga memiliki kekhasan arsitektur, dibuat berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Baduy secara turun temurun. Terdapat dua jenis jembatan di Baduy yang menjadi daya tarik wisatawan karena keunikannya yaitu Jembatan Akar dan Rawayan (lihat gambar 4).



Jembatan Akar



Jembatan *Rawayan*

**Gambar 4.** Jenis jembatan Baduy  
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

## PEMBAHASAN

Masyarakat adat Baduy menjalankan kehidupan keseharian mereka berdasarkan pedoman nilai leluhur. Seperti diketahui bahwa, nilai merupakan keyakinan seseorang atau kelompok tentang keinginan atas perilaku dan peristiwa (Fries, Schmid, & Hofer, 2007). Berbeda dengan pengertian tujuan, nilai bukanlah keadaan akhir yang ingin dicapai individu atau kelompok. Namun, nilai dapat digunakan sebagai standar evaluasi tujuan, oleh karena itu, nilai dapat mempengaruhi motivasi (Hofer et al., 2007). Tujuan kehidupan masyarakat Baduy adalah menjaga keseimbangan alam dengan berpedoman pada nilai leluhur adat mereka. Adanya nilai leluhur yang dijalankan secara turun menurun menjadi standar perilaku dan perbuatan masyarakat adat Baduy, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rokeach (1968) yang menganggap bahwa nilai merupakan standar atau kriteria untuk memandu tindakan individu, serta untuk mengembangkan dan mempertahankan sikap individu terhadap situasi dan objek yang relevan.

Nilai masyarakat Baduy dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu, nilai kehidupan, nilai tradisi dan kepercayaan, nilai menjaga keseimbangan alam, dan nilai tentang kebersamaan/gotong royong. Aturan tentang nilai dan pedoman hidup yang dijalankan oleh masyarakat Baduy disebut *pikukuh*. Menurut Garna (1988), *pikukuh* merupakan aturan dan cara atau pedoman bagaimana manusia berperilaku atau apa yang seharusnya dilakukan agar tidak melanggar perintah *karuhun* (nenek moyang). Masyarakat Baduy menyebut segala macam bentuk larangan *karuhun* dengan sebutan "*buyut*". *Buyut* dalam bahasa sunda disebut *cadu* atau *pamali* (terlarang). *Buyut* merupakan tindakan yang melanggar *pikukuh*, yang erat berkaitan dengan kepercayaan. Budaya *Pikukuh* masyarakat Baduy dikenal dengan sebutan *pikukuh* 10, yaitu: (1) "*Teu meunang binasa ka sasama*" yang berarti dilarang membinasakan sesama (makhluk hidup, termasuk hewan). (2) "*Teu meunang maling*" yang berarti bahwa dilarang mencuri (3) "*Teu meunang ingkar janji, ngabobong atawa nipu batur*" yang berarti dilarang ingkar janji, berbohong atau menipu (4) "*Teu meunang nginum nu ngamabokeun*" yang berarti dilarang minum yang memabukan (5) "*Teu meunang ngaduakeun hate*" yang berarti dilarang poligami atau nyandung (6) "*Teu meunang dabar tas panonpoe surup*" yang berarti dilarang makan setelah matahari terbenam (7) "*Teu meunang dangdan, dimedak, sabun atawa make seuseungitan*" yang berarti dilarang bersolek, menggunakan kosmetik, sabun, atau memakai wangi-wangian (8) "*Teu meunang sare tibra teuing*" yang berarti dilarang tidur terlalu nyenyak (9) "*Teu meunang ngawib lantaran senang*" yang berarti dilarang menyanyi karena senang (10) "*Teu meunang make barang mahal atawa rarangken: kongkorong, suweng, ali jeung geulang*" yang berarti dilarang mengenakan barang mahal atau perhiasan: kalung, anting, cincin dan gelang.

Bagi masyarakat umum diluar Baduy, nilai yang ada pada masyarakat Baduy terkesan individualistis, karena menyangkut hak seseorang atas kebebasan bertindak dan berperilaku. Namun berdasarkan pakar budaya, nilai-nilai yang ada pada sebuah kelompok bisa sangat individualistis dan pribadi (Schwartz, 1992). Definisi nilai yang paling berpengaruh adalah konsepsi, eksplisit atau implisit, khas dari individu atau karakteristik kelompok, yang mempengaruhi pemilihan, dan tujuan tindakan" (Kluckhohn, 1951).

Nilai *pikukuh* masyarakat Baduy yang dijalankan secara turun menurun sebagai sebuah sistem nilai budaya yang digunakan sebagai upaya pelestarian lingkungan. Konseptualisasi sistem nilai dikenal sebagai sebuah kebudayaan yang melekat pada masyarakat adat Baduy. (Kluckhohn & Strodtbeck, 1961) telah menegaskan bahwa sistem nilai adalah elemen inti dari

budaya. Nilai tidak terlihat sampai mereka menjadi jelas dalam sebuah perilaku, tetapi budaya memanifestasikan dalam elemen yang terlihat. Nilai budaya ini yang merupakan bentuk dari optimalnya partisipasi publik yang dilakukan oleh masyarakat adat Baduy terhadap pemerintah. Dasar nilai budaya Masyarakat adat Baduy memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam hal perumusan kebijakan terkait dengan pelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan partisipasi publik merupakan proses dimana perhatian publik, kebutuhan dan nilai-nilai dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan pemerintah (Creighton, 2005).

## PENUTUP

Nilai budaya masyarakat adat baduy merupakan bagian dari upaya pelestarian lingkungan yang telah dilakukan secara turun menurun. Nilai budaya tersebut tercermin melalui cara mereka bekerja dan bertahan hidup. Mata pencaharian mereka adalah dengan bertani ladang yang memanfaatkan tanah kering untuk dijadikan garapan sehingga tidak merusak kontur tanah. Cara mereka membangun rumah dan jembatan juga menggunakan bahan-bahan alami. Sehingga jelas bahwa kondisi alam di kawasan Baduy Indonesia masih tetap terjaga. Penerapan nilai budaya yang dilakukan masyarakat adat baduy merupakan bentuk partisipasi publik yang berjalan optimal, karena mampu memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal perumusan kebijakan tentang pelestarian lingkungan. Konsep hidup mereka yang menyatu dengan alam hingga kini masih dipertahankan. Suasana hijau dan udara yang sejuk jauh masih terasa dikawasan adat Baduy. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar untuk datang dan menikmati suasana yang berbeda dari suasana perkotaan. Nilai budaya masyarakat adat Baduy sebagai pendukung upaya pelestarian lingkungan tidak didukung oleh sikap wisatawan yang datang berkunjung. Maka, kedepan penelitian serupa menekankan pentingnya upaya wisatawan menjaga kelestarian alam di kawasan adat Baduy, karena menjaga kelestarian alam bukan hanya tugas masyarakat adat baduy tetapi seluruh pemangku kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, W. M., & Hulme, D. (2001). If community conservation is the answer, what is the question? *Oryx—The International Journal of Conservation*, 35, 193–200.
- Adler, J.H. (2001). Free & Green: a new approach to environmental protection. *Harvard Journal of Law & Public Policy*, 24, 653–694.
- Barton, B. (2002). *Underlying concepts and theoretical issues in public participation in resources development*. In D. Zillman, A. Lucas, & G. Pring (Eds.). *Human Rights in Natural Resources Development: Public Participation in the Sustainable Development of Mining and Energ*. Oxford University Press.
- Berghöfer, U., Rozzi, R., Jax, K. (2008). Local versus global knowledge: diverse perspectives on nature in the Cape Horn biosphere reserve. *Environmental Ethics*, 30(3), 273–294.
- Berkes, F. (2009). Community conserved areas: policy issues in historic and contemporary context. *Conservation Letters*, 2, 19–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1111/j.1755-263X.2008.00040.x>.
- Bieling, C., Eser, U., Plieninger, T. (2020). Towards a better understanding of values in sustainability transformations: ethical perspectives on landscape stewardship. *Ecosystems and People*, 16(1), 188–196.
- Bond, A., Palerm, J., Haigh, P. (2004). Public participation in EIA of nuclear power plant decommissioning projects: a case study analysis. *Environmental Impact Assessment Review*, 24, 617–641.
- Carreira, V., Machado, J.R., Vasconcelos, L. (2016). Legal citizen knowledge and public

- participation on environmental and spatial planning policies: a case study in Portugal. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2, 22–33.
- Chan, K.M.A., Balvanera, P., Benessaiah, K., Chapman, M., Díaz, S., GómezBaggethun, E., Gould, R., Hannahs, N., Jax, K., Klain, S., Luck, G.W., MartínLópez, B., Muraca, B., Norton, B., Ott, K., Pascual, U., Satterfield, T., Tadaki, M., Taggart, J., T. (2016). Why protect nature? Rethinking values and the environment. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United*, 113(6), 1462–1465.
- Charnley, S., Engelbert, B. (2005). Evaluating public participation in environmental decision-making: EPA's superfund community involvement program. *Journal of Environmental Management*, 77, 165–182.
- Ciaran, O. ' F. (2010). Public participation and environmental impact assessment: Purposes, implications, and lessons for public policy making. *Environmental Impact Assessment Review*, 30(10), 11–27.
- Creighton, J. L. (2005). *The public participation handbook: making better decisions through citizen involvement*. John Wiley & Sons.
- Creswell, J. W. & J. D. C. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. Sage Publications, Inc.
- Cullen, D., McGee, G.J., Gunton, T.I., Day, J.C. (2010). Collaborative planning in complex stakeholder environments: an evaluation of a two-tiered collaborative planning model. *Society and Natural Resources*, 23(4), 332–350.
- Daley, D.M. (2013). *Public Participation, Citizen Engagement, and Environmental Decision Making*. Oxford University Press.
- Daniels, S.E. (1996). Decision-making and ecosystem-based management: applying the Vroom-Yetton Model to public participation strategy. *Environmental Impact Assessment Review*, 16, 13–30.
- Devlin JF, Y. N. (2008). Contentious politics in environmental assessment: blocked projects and winning coalitions. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 26(1), 17–27.
- Doody, D.G., Kearney, P., Barry, J., Moles, R., O' Regan, B. (2009). Evaluation of the Q-method as a method of public participation in the selection of sustainable development indicators. *Ecological Indicators*, 9, 1129–1137.
- Farley, J.U., Lehmann, D.R. (1994). Cross-national “laws” and differences in market response. *Management Science*, 40(1), 111–122.
- Fries, S., Schmid, S., & Hofer, M. (2007). On the relationship between value orientation, valences, and academic achievement. *European Journal of Psychology of Education*, 22, 201–216.
- Garna, J. (1988). *Nyi Pohaci Sanghyang Asri, dalam Nurbadi Rangkuti (peny.) Orang Baduy dari Inti Jagat* (E. Bantara Budaya, Kompas Prosindo (ed.)). Yayasan Budhi Dharma Pradesha.
- Garnett, S., Burgess, N., Fa, J., Fern´andez-Llamazares, A., Moln´ar, Z., Robinson, C., Watson, J., Zander, K., Austin, B., Brondizio, E., Collier, N., Duncan, T., Ellis, E., Geyle, H., Jackson, M., Jonas, H., Malmer, P., McGowan, B., Sivongxay, A., Leipe. (2018). A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation. *Nature Sustainability*, 1, 369–374.
- Garnett, S. T., Sayer, J., & du Toit, J. (2007). Improving the effectiveness of interventions to balance conservation and development: A conceptual framework. *Ecology and Society*, 12(2).
- Hackel, J. D. (1999). Community conservation and the future of Africa's wildlife. *Conservation Biology*, 13, 726–734.
- Hasan, M.A., Nahiduzzaman, K.M., Aldosary, A.S. (2018). Public participation in EIA: a comparative study of the projects run by government and non-governmental organizations. *Environmental Impact Assessment Review*, 72, 12–24.
- Hindess, B. (2002). Deficit by design. *Australian Journal of Public Administration*, 61(1), 30–38.
- Hofer, M., Schmid, S., Fries, S., Dietz, F., Marten, C., & Reinders, H. (2007). Individual values,

- motivational conflicts, and learning for school. *Learning and Instruction*, 17(1), 17–28.
- Hofstede, G. (1989). Organising for cultural diversity. *European Management Journal*, 7(4), 390–397.
- Inglehart, R. (1997). *Modernization and postmodernization*. Princeton, Princeton University Press.
- IPBES. (2019). *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. IPBES.
- Jones, M.L., Alony, A. (2007). The cultural impact of information systems - through the eyes of Hofstede - a critical journey. *Issues in Informing Science and Information Technology*, 4(63), 407–419.
- Klamer, A. (2004). *Cultural goods are good for more than their economic value*. In V. Rao, & M. Walton (Eds.). *Culture and public action* (The Intern). Stanford University Press.
- Kluckhohn, C. (1951). *Values and value-orientations in the theory of action: an exploration* M. Kim *International Journal of Hospitality Management* 89 (2020) 102572 13 in definition and classification. In: Parsons, T., Shils, E. (Eds.), *Toward a General Theory of Action*. Harvard University Press.
- Kluckhohn, F.R., Strodtbeck, F.L. (1961). *Variations in Value Orientations*.
- Klyza, C., Sousa, D. (2013). *American Environmental Policy: beyond Gridlock*. MIT Press.
- Kopnina, H. et al. (2018). The ‘future of conservation’ debate: defending ecocentrism and the Nature Needs Half movement. *Biological Conservation*, 217, 140–148.
- Li, J.S., Chen, G.Q., Chen, B., Yang, Q., Wei, W.D., Wang, P., Dong, K.Q., Chen, H.P. (2016). The impact of trade on fuel-related mercury emissions in Beijing: evidence from three-scale input-output analysis. *Renewable & Sustainable Energy Reviews*, 75, 1–11.
- Liu, Y., Segev, S. (2017). Cultural orientations and environmental sustainability in households: a comparative analysis of Hispanics and non-Hispanic Whites in the United States. *International Journal of Consumer Studies*, 41(6), 587–596.
- McShane, T. O., & Wells, M. P. (2004). *Getting biodiversity projects to work: Towards more effective conservation and development*. Columbia University Press.
- Mistry, J., Berardi, A. (2016). Bridging indigenous and scientific knowledge. *Science*, 352, 1274–1275.
- Mooij, M. (2015). Cross-cultural research in international marketing: clearing up some of the confusion. *International Marketing Review*, 32(6), 646–662.
- Park, H., Russell, C., Lee, J. (2007). National culture and environmental sustainability: a crossnational analysis. *Journal of Economics and Finance*, 31(1), 104–121.
- Park, S.H., Hsieh, C.-M., Miller, J.C. (2015). Investigating tourists’ casino retention: cross-cultural comparison with Chinese and Westerners. *International Journal of Tourism Sciences*, 15((1–2)), 30–43.
- Patricia Leavy. (2017). *Research Design Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*. The Guilford Press.
- Pring, G., Noe, S.Y. (2002). *The emerging international law of public participation affecting global mining, energy and resources development*. In: Zillman, D.N., Lucas, A.R., Pring, G. (Eds.), *Human Rights in Natural Resource Development*. Oxford University Press, Oxford.
- Ringov, D., Zollo, M. (2007). The impact of national culture on corporate social performance. *Corporate Governance*, 7(4), 476–485.
- Rokeach, M. (1968). A theory of organization and change within value-attitude systems. *J. Soc*, 24(1), 13–33.
- Runhaar HAC, D. P. (2007). What makes strategic environmental assessment success-ful environmental assessment? The role of context in the contribution of SEA to decision-making. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 25(1), 2–14.
- Sample, V.A. (1993). A framework for public participation in natural resource decision making. *Journal of Forestry Research*, 91, 22-27.
- Schwartz, S. . (1992). *Universals in the content and structures of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries*. In: Zanna, M. (Ed.), *Advances in Experimental Psychology*. Academic

- Press.
- Schwartz, S. H. (2006). A theory of cultural value orientations: Explication and applications. *Comparative Sociology*, 5(2), 137–182.
- Segev, S. (2015). Modelling household conservation behaviour among ethnic consumers: the path from values to behaviours. *International Journal of Consumer Studies*, 39, 193–202.
- ShalomH. Schwartz. (2006). A Theory of Cultural Value Orientations: Explication and Applications. *Comparative Sociology*, 5(2–3).
- Thomas J. (1995). Public involvement in public management: adapting and testing a borrowed theory. *Public Administration Review*, 50(4), 435–451.
- Wang, Y., Shen, H., Ye, S., & zhou, L. (2020). Being rational and emotional: An integrated model of residents' support of ethnic tourism development. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 44(June), 112–121. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.05.008>
- Webler, T., Tuler, S. (2000). Fairness and competence in citizen participation: theoretical reflections from a case study. *Administration & Society*, 32, 566-595.
- Weisner, T.S., García Coll, C., Chatman-Nelson, C. (2010). *Theoretical perspectives on the macrosystem. In: Kreider, H., Lopez, M.E., Weiss, H.B., Chatman-Nelson, C. (Eds.), Preparing Educators to Engage Families: Case Studies Using an Ecocultural Systems.*
- Zhang, G.Q., Deng, N.N., Mou, H.Z., Zhang, Z.G., Chen, X.F. (2019). The impact of the policy and behavior of public on environmental governance performance: empirical analysis based on provincial panel data in China. *Energy Policy*, 129(7), 1347-1354.